

**PERBANDINGAN PELELANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN ATURAN
PERPRES RI NOMOR 70 TAHUN 2012 DAN PERPRES RI NOMOR 4
TAHUN 2015 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG**

Mirza Achmad

Zony Yulfadly, ST.,MT

Ari Sasmoko Adi, ST.,MT

Jurusan Teknik Sipil

Fakultas Teknik

Universitas 17 Agustus 1945

ABSTRACT

The auction is the procurement of goods and services that are conducted openly with the announcement widely through printed media, electronic media and official announcement board so that the broad community / business world who are interested and have the qualification can follow it. The auctions implemented by the government, especially in the Kutai Kartanegara district of East Kalimantan are now carried out electronically.

With the aim of providing input and solutions in improving the understanding of electronic procurement system / goods. With the identification to know and understand the comparison of auction system implemented based on Presidential Regulation 70 of 2012 and Presidential Regulation 4 of 2015 in Kutai Kartanegara Regency.

The method used in data collection is by way of questionnaires and interviews to the users of services and service providers. While the data analysis method using SPSS software version 16.00.

From the analysis result, it can be concluded with the procurement system of goods / services based on Perpres 70 of 2012 and Perpres 4 year 2015 in Kutai Kartanegara Regency resulted the comparison of positive and easy-to-understand system for both service users and service providers.

Keywords: Comparison of auction system, Perpres 70 Year 2012, Perpres 4 Year 2015.

- 1) Karya Siswa Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- 2) Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- 3) Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

PENGANTAR

Penyelenggaraan proyek pengadaan barang dan jasa di Indonesia, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang terdiri dari proyek swasta dan proyek pemerintahan. Proyek pemerintahan, pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana pertanggung jawabannya harus diupayakan secermat mungkin dan harus mengikuti peraturan – peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Awalnya sistem pelelangan yang dilaksanakan adalah secara manual (konvensional). Namun pada saat ini sistem pelelangan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilaksanakan secara elektronik. pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan sebagaimana ketentuan dalam pasal 131 ayat (1) bahwa pada tahun 2015 Kementrian, Lembaga, Daerah, Instansi(K/L/D/I) wajib melaksanakan Pengadaan barang dan Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan.

Selain itu dalam Perpres 172 Tahun 2014 dan 4 Tahun 2015 juga mengatur mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). ingin memahami perbandingan sistem pelelangan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang di laksanakan secara elektronik berdasarkan Perpres RI No 70 Tahun 2010 dengan Perpres Ri No 4 Tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa masalah yang kemudian difokuskan pada bagaimana hasil identifikasi sistem pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres 70/2012 dengan 4/2015 pada pengguna jasa dan penyedia jasa yang validitas dan reliabelitas, dan apa sajakah perbandingan yang menonjol pada sistem pengadaan barang dan jasa pada Perpres 70/2012 dengan 4/2015 di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun Maksud dalam penelitian ini, adalah diharapkan mahasiswa mendapatkan ilmu dan memahami, sistem pelelangan pengadaan barang dan jasa antara Perpres 70/2012 dengan 4/2015. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan sistem pengadaan barang dan jasa pada pengguna jasa dan penyedia jasa antara Perpres 70/2012 dengan 4/2015, Mengerti dan memahami perbandingan pada sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Perpres 70/2012 dan 4/2015.

Untuk membatasi luasnya ruang lingkup pembahasan dalam suatu penelitian, maka penelitian ini lebih difokuskan pada Identifikasi permasalahan sistem pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres 70/2012 dengan 4/2015 di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang validitas dan reliabelitas, Perbandingan yang menonjol pada sistem pengadaan barang dan jasa pada Perpres 70/2012 dengan 4/2015 di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

CARA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan objek yang di tinjau adalah perbandingan sistem pengadaan barang dan jasa pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang di laksanakan di instansi pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya ialah pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong.

Untuk menunjang kelengkapan dalam penelitian ini memerlukan data yang bersumber dari data primer yaitu : data yang dikumpulkan dari kuisisioner penyedia jasa dan pengguna jasa dan data sekunder yaitu : Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Permen PU RI, 14–PRT– M–2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, Lampiran I Permen PU RI, 14 – PRT – M – 2013 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi, Dan Penghitungan Penyesuaian Harga/Eskalasi, Perka LKPP No 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Perka LKPP No 06 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, tentang Matriks Peraturan Presiden Nomer 4 Tahun 2015, Sujarweni, V.W., 2015 tentang SPSS Untuk Penelitian, Jurnal Tugas Akhir Analisis Ulang manajemen Pelelangan oleh Muhammad Farid Hudaya Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Islam Yogyakarta tahun 2008.

Pada pembahasan penelitian ini, mengolah data kuisisioner yang dilakukan pada pengguna jasa dan penyedia jasa di Unit/Bagian Layanan Pengadaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan instansi pemerintahan lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan aplikasi SPSS Versi 16.0 serta merangkum apa saja yang menjadi perbandingan yang menonjol dari sistem pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres 70/2012 dengan 4/2015 di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Analisa Data Dengan SPSS

Analisa data menggunakan SPSS menilai secara kuantitatif dan dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas.

- a) *Input* lembar kerja
- b) *Input* data hasil kuisisioner
- c) Mengolah data kuisisioner
- d) *Analyze* dan menyimpan hasil data hasil uji

2. Pengertian Dari Masing-Masing Uji Dengan SPSS

a) Uji Validitas

Uji validitas adalah prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah kuisisioner yang digunakan akan mengukur variable penelitian yang valid atau tidak. kuisisioner akan dikatakan valid apabila kuisisioner tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan dari suatu instrumen.

Untuk uji validitas dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 30 maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui tabel r *product moment pearson* dengan *df (degree of freedom) = n-2*, jadi *df = 30-2=28*, maka r tabel = 0,312 sesuai dengan teori di buku V.Wiratna Sujarweni, 2015. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel. Dapat dilihat dari *Corrected Item Total Correlation*.

b) Uji Reliabilitas

Reliabilitas atau keandalan, adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten dan suatu instrumen dianggap reliabel apabila instrumen tersebut dapat dipercaya sebagai alat ukur data penelitian.

Penelitian uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan rumus *Croanbach's Alpha*, yaitu :

$$r1 = \frac{n}{n-1} \left(1 - \frac{\sum si^2}{\sum st^2} \right)$$

Keterangan :

- r1 = Realiabilitas instrumen
- n = Jumlah butir pertanyaan
- Si² = Varians butir
- St² = Varians total

Kriteria dari nilai *Croanbach's Alpha* adalah apabila didapatkan nilai *Croanbach's Alpha* kurang dari 0,60 kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel adalah reliabel.

3. Mendeskripsikan Perbandingan-Perbandingan Yang Menonjol Pada Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pada Perpres 70/2012 Dengan 4/2015 Di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data hasil pembahasan tentang Perbandingan Pelelangan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Berdasarkan Aturan Perpres Ri Nomor 70 Tahun 2012 Dan Perpres Ri Nomor 4 Tahun 2015 Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggara didapat kesimpulan yaitu.

1. Hasil Identifikasi Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Perpres 70/2012 Dengan 4/2015 Pada Pengguna Jasa Dan Penyedia Jasa Yang Validitas Dan Reliabelitas.

A. Dari Uji Validasi Didapat Hasil Sebagai Berikut :

1) Variabel Pengguna Jasa

- a) Pada pertanyaan sistem layanan Perpres 70 tahun 2012 terdapat 7 instrumen yang valid dan 8 instrumen tidak valid/gugur ($>0,312$), dan
- b) Pada pertanyaan sistem layanan Perpres 4 tahun 2015 terdapat 9 instrumen yang valid dan 6 instrumen tidak valid/gugur ($>0,312$).

Tabel 1 Data hasil uji validitas variabel pengguna jasa

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
P1	0,712	$> 0,312$	Valid
P2	0,290	$> 0,312$	Item Soal Tidak Valid
P3	0,351	$> 0,312$	Valid
P4	0,172	$> 0,312$	Item Soal Tidak Valid
P5	0,344	$> 0,312$	Valid
P6	0,449	$> 0,312$	Valid
P7	0,540	$> 0,312$	Valid
P8	0,464	$> 0,312$	Valid
P9	0,111	$> 0,312$	Item Soal Tidak Valid
P10	0,462	$> 0,312$	Valid
P11	-0,173	$> 0,312$	Item Soal Tidak Valid
P12	0,249	$> 0,312$	Item Soal Tidak Valid
P13	-0,084	$> 0,312$	Item Soal Tidak Valid
P14	-0,100	$> 0,312$	Item Soal Tidak Valid
P15	0,158	$> 0,312$	Item Soal Tidak Valid
P16	0,518	$> 0,312$	Valid
P17	0,632	$> 0,312$	Valid
P18	0,434	$> 0,312$	Valid
P19	-0,154	$> 0,312$	Item Soal Tidak Valid
P20	0,535	$> 0,312$	Valid
P21	0,156	$> 0,312$	Item Soal Tidak Valid
P22	0,083	$> 0,312$	Item Soal Tidak Valid

P23	0,347	> 0,312	Valid
P24	0,537	> 0,312	Valid
P25	0,179	> 0,312	Item Soal Tidak Valid
P26	-0,389	> 0,312	Valid
P27	0,440	> 0,312	Valid
P28	0,022	> 0,312	Item Soal Tidak Valid
P29	-0,018	> 0,312	Item Soal Tidak Valid
P30	0,662	> 0,312	Valid

2) Variabel Penyedia Jasa

- a) Pada pertanyaan sistem layanan Perpres 70 tahun 2012 terdapat 11 instrumen yang valid dan 4 instrumen tidak valid/gugur ($>0,312$), dan
- b) Pada pertanyaan sistem layanan Perpres 4 tahun 2015 terdapat 9 instrumen yang valid dan 6 instrumen tidak valid/gugur ($>0,312$).

Tabel 2 Data hasil uji validitas variabel penyedia jasa

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
P1	0,441	> 0,312	Valid
P2	0,519	> 0,312	Valid
P3	0,541	> 0,312	Valid
P4	0,607	> 0,312	Valid
P5	0,325	> 0,312	Valid
P6	0,379	> 0,312	Valid
P7	0,201	> 0,312	Item Soal Tidak Valid
P8	0,030	> 0,312	Item Soal Tidak Valid
P9	0,352	> 0,312	Valid
P10	0,587	> 0,312	Valid
P11	-0,050	> 0,312	Item Soal Tidak Valid
P12	0,444	> 0,312	Valid
P13	0,320	> 0,312	Valid
P14	0,123	> 0,312	Item Soal Tidak Valid
P15	0,585	> 0,312	Valid
P16	0,747	> 0,312	Valid
P17	0,435	> 0,312	Valid
P18	0,208	> 0,312	Item Soal Tidak Valid
P19	0,670	> 0,312	Valid
P20	0,438	> 0,312	Valid

P21	0,365	> 0,312	Valid
P22	0,322	> 0,312	Valid
P23	0,169	> 0,312	Item Soal Tidak Valid
P24	0,171	> 0,312	Item Soal Tidak Valid
P25	0,190	> 0,312	Item Soal Tidak Valid
P26	-0,037	> 0,312	Item Soal Tidak Valid
P27	0,506	> 0,312	Valid
P28	0,040	> 0,312	Item Soal Tidak Valid
P29	0,532	> 0,312	Valid
P30	0,534	> 0,312	Valid

Hasil uji variabel kuisisioner tidak valid/gugur adalah kebanyakan di sebabkan oleh responden yang menjawab dengan keragu-raguan (jawaban c.sedang/3 point), dan atau pertanyaan yang ada didalam kuisisioner tersebut rancu/membingungkan responden.

B. Dari Uji Reliabilitas Didapatkan Hasil Sebagai Berikut :

1) Pada Variabel Pengguna Jasa

Diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* pada instrumen pertanyaan sistem layanan Perpres 70 tahun 2012 adalah 0,641 >0,60 dan pada instrumen pertanyaan sistem layanan Perpres 4 tahun 2015 diperoleh hasil 0,654 >0,60. Maka hasil uji adalah reliabel.

Tabel 3 Hasil uji *reliability* pada pengguna jasa pertanyaan P1-15

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.641	15

Tabel 4 Hasil uji *reliability* pada pengguna jasa pertanyaan P16-30

Case Processing Summary

		N	%
<i>Cases</i>	<i>Valid</i>	30	100.0
	<i>Excluded^a</i>	0	.0
	<i>Total</i>	30	100.0

a. *Listwise deletion based on all variables in the procedure.*

Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.654	15

2) Pada Penyedia Jasa

Diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* pada instrumen pertanyaan sistem layanan Perpres 70 tahun 2012 adalah 0,756 >0,60 dan pada instrumen pertanyaan sistem layanan Perpres 4 tahun 2015 diperoleh hasil 0,756 >0,60. Maka hasil uji adalah reliabel.

Tabel 5 Hasil Uji *reliability* pada penyedia jasa pertanyaan P1-15

Case Processing Summary

		N	%
<i>Cases</i>	<i>Valid</i>	30	100.0
	<i>Excluded^a</i>	0	.0
	<i>Total</i>	30	100.0

a. *Listwise deletion based on all variables in the procedure*

Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.756	15

Tabel 6 Hasil Uji reliability pada penyedia jasa pertanyaan P16-30

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.756	15

Tabel 7 Hasil uji reliabilitas antara pengguna jasa dan penyedia jasa

No.	Variabel	Hasil Uji	Keterangan
1.	Pengguna jasa P1-15	0,641 < 0,60	Reliabel
	Pengguna jasa P16-30	0,654 < 0,60	Reliabel
2.	Penyedia jasa P1-15	0,756 < 0,60	Reliabel
	Penyedia jasa P16-30	0,756 < 0,60	Reliabel

2. Perbandingan Pada Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Perpres 70/2012 Dengan 4/2015 Di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada perbandingan yang menonjol pada sistem pengadaan barang dan jasa pada Perpres 70/2012 dengan 4/2015 di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, penulis mendeskripsikan sebagai berikut:

1) Pejabat Pengadaan

- a. Pada Perpres 70/2012 : Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
- b. Sedangkan pada Perpres 4/2015 : Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing*.

2) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi

- a. Pada Perpres 70/2012 : Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a.) merupakan kebutuhan operasional k/l/d/i; dan/atau b.) bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Sedangkan pada Perpres 4/2015 : Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pengadaan langsung dapat dilaksanakan melalui perorangan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

3) Fitur SPSE

- a. Pada Perpres 70/2012 : SPSE yang digunakan adalah versi 3.5.
- b. Sedangkan pada Perpres 4/2015 : SPSE yang digunakan adalah versi 3.6. yaitu terdapat penambahan slot penjelasan dokumen yang dapat diisi oleh panitia pada saat anwijzing untuk tanya jawab dan penjelasan tentang dokumen pengadaan. Pada aplikasi versi ini tidak terdapat menu/tombol pemberitahuan sanggahan banding.

Saran yang dapat berikan peneliti untuk mensukseskan pelaksanaan pelelangan yang dilaksanakan berdasarkan Perpres Ri nomor 70 tahun 2012 dan Perpres Ri nomor 4 tahun 2015 adalah Bahwasanya Sumber Daya Manusia (SDM) harus lebih siap dalam menghadapi kemajuan teknologi khususnya dalam pemahaman pelelangan yang dilakukan secara elektronik. Dalam proses pengadaan barang dan jasa sebaiknya lebih tegas lagi dalam penerapakan aturan yang berlaku sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Diadakan uji yang lebih kompleks untuk mendapatkan pengembangan yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Perpres RI NO. 54 Tahun 2010, *Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*, Jakarta.
- Perpres RI NO. 70 Tahun 2012, *Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta.
- Perpres RI NO. 4 Tahun 2015, *Peraturan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*, Jakarta.
- Permen PU RI, 14 – PRT – M – 2013, *Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi*, Jakarta.
- Lampiran I Permen PU RI, 14 – PRT – M – 2013, *Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi, Dan Penghitungan Penyesuaian Harga/Eskalasi*, Jakarta.
- Perka LKPP, 14 – 2012, *Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta.
- Perka LKPP, 06 – 2012, *Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta.
- Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, *Matriks Peraturan Presiden Nomer 4 Tahun 2015*, Jakarta.
- Sujarweni, V.W., 2015, *SPSS Untuk Penelitian*, Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945, 2015, *Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik*, Samarinda.
- Muhammad Farid Hudaya 2008, *Jurnal Tugas Akhir Analisis Ulang manajemen Pelelangan*, Yogyakarta, Universitas Islam.